

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai referensi beserta perbedaan dan persamaan yang digunakan untuk tujuan penelitian ini:

##### 1. **Ariyani, R & Gunawan, J (2014)**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh pengungkapan GCG dan CSR atas kinerja perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek tahun 2005-2010. Pengukuran pengungkapan GCG menggunakan IGCG dan pengungkapan CSR menggunakan ICSR. Sedangkan kinerja perusahaan perbankan diukur menggunakan ROA dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap GCG dan pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan. Persentase pengungkapan GCG adalah cenderung meningkat dan pengungkapan CSR berfluktuasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

##### **Persamaan:**

- 1) Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*, sedangkan untuk *variable* dependennya kinerja keuangan.

- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.
- 3) Populasi sampel yang sama yaitu perusahaan perbankan.

**Perbedaan:**

Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2005-2010, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

**2. Arifani, R. (2013)**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti melihat bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat diidentifikasi dengan melihat jumlah komite audit, proporsi kepemilikan, dan proporsi komisaris institusional. Di dalam penelitian ini ROE digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 186 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2011. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* yaitu *stratified random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen, proporsi kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Tetapi hasil penelitian ini tidak menemukan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan.

**Persamaan :**

Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *variable* dependen kinerja keuangan.

**Perbedaan :**

- 1) Menambahkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen.
- 2) Teknik pengambilan sampel di penelitian sebelumnya menggunakan *probability sampling*, sedangkan di penelitian yang sekarang menggunakan teknik *purposive sampling*.
- 3) Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian yang sekarang menggunakan perusahaan perbankan.
- 4) Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2010-2011, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

**3. Syahnaz, M., & Herawati, T. (2013)**

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate social, tanggung jawab untuk kinerja keuangan perbankan. Populasi dalam penelitian ini semua perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2009-2011, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang berakhir 31 Desember selama periode 2009-2011, melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan 2009-2011 secara berturut-turut, dan perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Sehingga mendapat total sampel sebanyak 42 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Metode analisis data yang digunakan dalam melakukan pengujian ini adalah model regresi.

**Persamaan :**

- 1) Menggunakan *variable* independen *corporate social responsibility* dan *variable* dependen kinerja keuangan.
- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.
- 3) Populasi sampel yang sama yaitu perusahaan perbankan.

**Perbedaan :**

- 1) Menambahkan *good corporate governance* sebagai variabel independen.
- 2) Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2009-2011, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

**4. Wati, L.M (2013)**

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dan periode penelitian selama 2008-2010 sehingga memperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi model regresi. Hasil dalam penelitian ini

menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan ROE dan NPM.

**Persamaan :**

- 1) Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *variable* dependen kinerja keuangan.
- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

**Perbedaan :**

- 1) Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian yang sekarang menggunakan perusahaan perbankan.
- 2) Menambahkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen.
- 3) Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2008-2010, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

**5. Windah, G. C., & Andono, F. A. (2013)**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei *The Indonesian Institute Perception Governance (IICG)* Periode 2008-2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan periode 2008-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* tahun 2008-2011. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik regresi berganda secara

parsial. Dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan.

**Persamaan :**

- 1) Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *variable* dependen kinerja keuangan.
- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

**Perbedaan :**

- 1) Menambahkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen.
- 2) Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2008-2011, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

**6. Ferdiana, N. (2012)**

Peneliti ingin meneliti tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan di BEI periode 2005-2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel 9 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat bantu dalam pengolahan dan menganalisis data.

**Persamaan :**

- 1) Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *variable* dependen kinerja keuangan.
- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

**Perbedaan :**

- 1) Pada penelitian sebelumnya menggunakan populasi sampel perusahaan pertambangan, sedangkan pada penelitian yang sekarang menggunakan populasi sample perusahaan perbankan.
- 2) Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2005-2010, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

**7. Prasinta, D. (2012)**

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Sampel yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Dalam penelitian ini penerapan *good corporate governance* diukur dengan skor CGPI, sedangkan untuk kinerja keuangannya diukur menggunakan ROE dan *Tobin's Q*. Sehingga, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif antara *Good Corporate Governance* dengan *Return On Equity* dan tidak terdapat hubungan positif pula antara *Good Corporate Governance* dengan *Tobin's Q*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja operasional, namun pencapaian laba

perusahaan dan respon pasar atas implementasi *good corporate governance* masih kurang.

**Persamaan :**

- 1) Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *variable* dependen kinerja keuangan.
- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

**Perbedaan :**

- 1) Menambahkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen.
- 2) Pada penelitian yang sekarang menggunakan populasi sample perusahaan perbankan.

**8. Wijayanti, S & Mutmainah, S. (2012)**

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Didalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan yang digunakan untuk pengambilan sampel ada dengan metode *purposive sampling*, dan metode analisis yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah regresi berganda.



**Persamaan :**

- 1) Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *variable* dependen kinerja keuangan.
- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

**Perbedaan :**

- 1) Menambahkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen.
- 2) Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2009-2011, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

**9. David Tjondro dan R. Wilopo (2011)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *good corporate governance* memberikan pengaruh terhadap profitabilitas dan kinerja saham pada perusahaan perbankan yang telah go publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Alat uji yang digunakan peneliti adalah analisis regresi. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel ada dengan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa GCG memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dari ROA, ROE, dan NIP. Sehingga semakin baik penerapan GCG maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

**Persamaan :**

- 1) Menggunakan *variable* independen *good corporate governance* dan *variable* dependen kinerja keuangan.

- 2) Teknik pengambilan data yang sama, yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*.

**Perbedaan :**

- 1) Menambahkan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen.
- 2) Periode pengambilan sampel penelitian yang sebelumnya tahun 2008, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode 2012-2015.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori dasar keagenan ini sering dijadikan sebagai acuan dalam memahami konsep *Good Corporate Governance*. Teori agensi erat kaitannya dengan hubungan keagenan yang melibatkan pendelegasian pekerjaan dari pemilik badan usaha/ pemegang saham (*principal*) kepada manajemen (*agen*). Menurut teori agensi, *agen* harus memimpin badan usaha dengan keahlian, kebijaksanaan, tidak baik dan tingkah laku yang wajar dan adil untuk kepentingan *principal*-nya. Tetapi dalam praktiknya, timbul agensi problem karena adanya kesenjangan antara kepentingan *principal* dan *agen*. *Principal* memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikan memberikan return yang maksimal, sedangkan *agen* memiliki kepentingan untuk memperoleh insentif atas pengelolaan dana *principal* (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Untuk mengatasi agensi problem ini maka dibutuhkan penerapan *good corporate governance* yang bertujuan untuk dapat mengelola perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen* agar tidak menimbulkan kerugian bagi

kedua pihak tersebut (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, 2011).

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Dawan (2013) Teori keagenan menunjukkan hubungan antara pihak yang bekerja sama tapi mempunyai posisi yang berbeda. Prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajemen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya.

Tujuan utama dari teori *agency* itu sendiri yaitu mengetahui tentang bagaimana pihak-pihak pada perusahaan yang melakukan hubungan kontrak dapat membuat sistem pada kontrak tersebut yang bertujuan meminimalkan biaya sebagai dampak dari adanya informasi atau laporan yang tidak simetris dan kondisi perusahaan yang mengalami ketidakpastian. Teori keagenan ini juga bisa digunakan untuk menjawab berbagai masalah keagenan pada entitas yang disebabkan karena adanya pihak yang membuat kerja sama pada suatu perusahaan tetapi memiliki tujuan yang tidak sejalan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola suatu entitas. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### 2.2.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy theory*)

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2014:441) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Karena legitimasi adalah hal penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2014:442) memberikan alasan logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan bahwa “Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidak selarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan”.

Hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan tentang

konsep kontrak sosial, yaitu: “semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki” (Ghozali dan Chariri, 2014:442). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial selalu berkembang seiring berjalannya waktu, untuk itu maka perusahaan diharapkan selalu menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya dengan nilai – nilai lingkungan masyarakat agar tidak terjadi legitimasi gap antara keduanya. Legitimasi gap dapat terjadi karena tiga alasan. Pertama, ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. Kedua, kinerja perusahaan berubah namun harapan masyarakat tidak berubah. Ketiga, kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda” Wartici dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007:413). Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011).

### **2.2.3 Pengertian dan Konsep *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk

semua *stakeholders*. Konsep ini menekankan pada dua hal yaitu, yang pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu serta transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders* (Sutedi, 2012:2)

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/202, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam rangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan organisasi. Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern (internal kontrol) bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi kondisi keuangan dan nok keuangan bank (Effendi, 2009:84).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* bahwa dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholders*, meingkatkan kinerja bank, dan meningkatkan nilai-nilai etika yang berlaku umum seta meningkatkan kepathan terhadap perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan. Bank wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

**a) Prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Pelaksanaan GCG pada industri harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yang sudag diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. **Transparasi (*Transparency*)**  
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Kesesuaian pengelolaan bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**  
Pelaksanaan tanggung jawab dan kejelasan fungsi organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
4. **Independensi (*Independency*)**  
Pengelolaan bank secara profesional tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Kesetaraan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang sudah disepakati.

**b) Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Dalam memastikan penerapan lima prinsip dasar GCG tersebut bank harus menerapkan (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi sebelas faktor penilaian terhadap pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas Direksi
3. Pelaksanaan dan kelengkapan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Penyediaan dana besar dan penyediaan dana kepada pihak terkait
10. Transparansi kondisi non keuangan dan keuangan bank, pelaporan internal dan laporan pelaksanaan GCG
11. Rencana startegis bank

Menurut Tjondro & Wilopo (2011) dalam pelaporan *self assessment* GCG ada beberapa tahapan sampai pada hasil akhir penilaian komposit serta



bagaimana perlakuan terhadap hasil pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/pengawasan Bank Indonesia:

- 1) Menetapkan nilai peringkat per faktor, dengan melakukan analisis *self assessment* dengan cara membandingkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi bank yang sebenarnya.
- 2) Menetapkan nilai komposit hasil *self assessment*, dengan cara membojot seluruh faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan predikat kompositnya.
- 3) Dalam penetapan Predikat, perlu diperhatikan batasan berikut :
  - a. Apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai peringkat 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai bank adalah "Cukup Baik";
  - b. Apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai peringkat 4, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai bank adalah "Baik".
- 4) Apabila hasil pelaksanaan *self assessment* GCG bank menunjukkan perbedaan yang material yakni mengakibatkan hasil predikat komposit yang berbeda, maka bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan *self assessment* GCG bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia.
- 5) Revisi hasil *self assessment* pelaksanaan GCG bank tersebut, harus dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode terdekat, meliputi nilai 5 komposit dan predikatnya.

- 6) Hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan GCG sebagaimana yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG satuan pengukuran dalam *self assessment* GCG adalah nilai absolut yang sudah ditentukan yang disebut dengan nilai komposit.

Menurut Tjondro & Wilopo (2011) penetapan peringkat faktor GCG dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Penetapan peringkat factor GCG dilakukan dengan berpedoman pada matriks peringkat faktor GCG.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance***

Peringkat	Definisi
1.	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b> . hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> . apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2.	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum <b>baik</b> . hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> . apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.
3.	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum <b>cukup baik</b> . hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> . apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.
4.	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum <b>kurang baik</b> . hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-

	prinsip <i>good corporate governance</i> . terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5.	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum <b>tidak baik</b> . hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> . kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

#### 2.2.4 *Corporate Social Responsibility*

Menurut Syahnaz dan Herawati (2003) *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. Investor lebih beminat pada perusahaan yang memiliki citra yang

baik di mata masyarakat karena semakin baik citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Wulan dan Yeterina (2012), *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan. Ranah tanggung jawab sosial mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial juga mendukung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholder* eksternal (Nor Hadi, 2011:60)

*Annual report* digunakan sebagai salah satu media untuk mengungkapkan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Annual report* merupakan sarana komunikasi perusahaan dengan pihak eksternal. Telah dianjurkan dalam PSAK No.1 tahun 2009 paragraf 9 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan bahwa “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri

yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Saat ini perusahaan dituntut untuk mengelolah dampak perusahaan agar memungkinkan terciptanya pembangunan berkelanjutan. Untuk memnuhi tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan mengungkapkannya dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Ismail Solihin. 2008:129).

Perhitungan indeks CSRDI<sub>j</sub> dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian yang diungkapkan oleh perusahaan diberikan nilai 1 dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari keseluruhan item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. rumusan perhitungan CSRDI<sub>j</sub> adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

CSRDI<sub>j</sub> : *Corporate Social Responsibility Dis-closure Index* perusahaan j

N<sub>j</sub> : jumlah item untuk perusahaan j

$\sum X_{ij}$  : 1 = jika item diungkapkan; 0 = jika item tidak diungkapkan

Manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan CSR adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas.
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal.
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko.

*Global Reporting Index (GRI)* adalah sebuah pedoman atau standar pengukuran CSR oleh perusahaan. standar GRI ini meliputi 6 aspek, yaitu: Aspek Ekonomi, Aspek Tenaga Kerja dan Kepatuhan Kerja, Aspek Hak Asasi Manusia, Aspek Masyarakat, Aspek Tanggung Jawab Produk. Pedoman ini telah dikembangkan melalui proses multi *stakeholder* yang menggabungkan partisipasi aktif bisnis, investasi akuntansi penelitian hak asasi manusia dan organisasi tenaga kerja dari seluruh dunia. masing-masing standar pengungkapan tersebut memiliki beberapa aspek yang harus diungkapkan dalam laporan CSR perusahaan berikut ini terdapat beberapa tabel indikator CSR.

**Tabel 2.2**  
**Standar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Jenis Standar Pengungkapan	Aspek Terkait
<b>Strategi Dan Profil</b>	a. Visi dan strategi b. Profil c. Hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, struktur dan sistem manajemen
<b>Pendekatan Manajemen dan</b>	1. Ekonomi

<b>Indikator Pelaksanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja ekonomi</li> <li>b. Kehadiran pasar</li> <li>c. Dampak ekonomi tidak langsung</li> <li>2. Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Material</li> <li>b. Energi</li> <li>c. Air</li> <li>d. Keanekaragaman hayati</li> <li>e. Emisi, anak sungai dan limbah produk dan jasa</li> <li>f. Pemenuhan</li> <li>g. keseluruhan</li> </ul> </li> <li>3. Praktek tenaga kerja dan kepatuhan kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerja</li> <li>b. Tenaga kerja/hubungan pihak manajemen</li> <li>c. Kesehatan dan keamanan kerja</li> <li>d. Pelatihan dan pendidikan</li> <li>e. Kesempatan yang berbeda dan sama</li> </ul> </li> <li>4. Hak asasi manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Investasi dan perantaraan</li> <li>b. Tidak diskriminatif</li> <li>c. Kebebasan bersosialisasi dan pertimbangan kolektif</li> <li>d. Teman kerja muda/anak-anak</li> <li>e. Hak dan kewajiban tenaga kerja</li> <li>f. Praktek keamanan</li> <li>g. Hak-hak masyarakat pribumi</li> </ul> </li> <li>5. Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat</li> <li>b. Korupsi</li> <li>c. Kebijakan umum</li> <li>d. Perilaku anti persaingan</li> <li>e. Pemenuhan</li> </ul> </li> <li>6. Tanggung jawab produk <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesehatan dan keamanan pelanggan</li> <li>b. Pemberian nama produk dan jasa</li> <li>c. Privasi pelanggan</li> <li>d. Pemenuhan</li> </ul> </li> </ul>
------------------------------	--

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guideliness

Dari masing-masing standar tersebut, terdapat beberapa penjelasan dari tiap-tiap item pengungkapan dyang harus diungkapkan oleh masing-masing

perusahaan dalam menerapkan CSR. Tabel berikut akan menjelaskan item-item penjelasan dari pengungkapan CSR oleh perusahaan.

**Tabel 2.3**  
**Item yang diungkapkan berdasarkan strategi dan profil**

<b>Jenis Standar Pengungkapan</b>	<b>Aspek Terkait</b>
<b>Visi dan Startegi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan dari sebagian besar pengambil keputusan tertinggi dari organisasi yang menjelaskan tentang hubungan tanggung jawab dari organisasi serta strateginya</li> <li>b. Deskripsi dari dampak, risiko, dan kesempatan</li> </ul>
<b>Profil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama organisasi</li> <li>b. Merek utama, produk dan jasa</li> <li>c. Struktur operasional dari organisasi</li> <li>d. Pusat lokasi organisasi</li> <li>e. Jumlah dan namakota dimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasional</li> <li>f. Kepemilikan dan operasional</li> <li>g. Pelayanan pasar</li> <li>h. Skala dari pelaporan organisasi</li> <li>i. Perusahaan yang signifikan selama pelaporan meliputi ukuran dan struktur atau kepemilikan</li> <li>j. Penghargaan yang diterima</li> </ul>
<b>Hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, struktur dan sistem manajemen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hal yang berhubungan dengan pemerintah</li> <li>b. Komitmen dengan pihak internal</li> <li>c. Perjanjian dengan stakeholders</li> </ul>

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guideliness

**Tabel 2.4**  
**Item yang diungkapkan berdasarkan pendekatan manajemen**

<b>KODE</b>	<b>ITEM YANG HARUS DIUNGKAPKAN</b>
<b>EC</b>	Ekonomi ( <i>Economic</i> )
<b>EN</b>	Lingkungan ( <i>Environment</i> )
<b>LA</b>	Praktek Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja ( <i>Labour Practice and Decent Work</i> )
<b>HR</b>	Hak Asasi Manusia ( <i>Human Right</i> )



<b>SO</b>	Masyarakat ( <i>Society</i> )
<b>PR</b>	Tanggung Jawab Produk ( <i>Product Responsibility</i> )

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guidelines

**Tabel 2.5**  
**Indikator Pelaksanaan Pengungkapan Ekonomi**

<b>KODE</b>	<b>ITEM YANG HARUS DIUNGKAPKAN</b>
<b>Kinerja Ekonomi</b>	<p><b>EC1</b> Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa, laba di tahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.</p> <p><b>EC2</b> Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.</p> <p><b>EC3</b> Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti</p> <p><b>EC4</b> Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.</p>
<b>Kehadiran Pasar</b>	<p><b>EC5</b> Rentang rasio standar terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.</p> <p><b>EC6</b> Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.</p> <p><b>EC7</b> Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.</p>
<b>Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>	<p><b>EC8</b> Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura.</p> <p><b>EC9</b> Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.</p>

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guidelines

**Tabel 2.6**  
**Indikator Pelaksanaan Pengungkapan Lingkungan**

<b>KODE</b>	<b>ITEM YANG HARUS DIUNGKAPKAN</b>
<b>Material</b>	<p><b>EN1</b> Penggunaan bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume.</p> <p><b>EN2</b> Persentase penggunaan bahan daur ulang.</p>
<b>Energy</b>	<p><b>EN3</b> Penggunaan energi langsung dari sumber daya energi primer.</p> <p><b>EN4</b> Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer.</p> <p><b>EN5</b> Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi.</p> <p><b>EN6</b> inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.</p> <p><b>EN7</b> inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.</p>
<b>Air</b>	<p><b>EN8</b> Total pengambilan air per sumber.</p> <p><b>EN9</b> sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.</p> <p><b>EN10</b> Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.</p>
<b>Keanekaragaman Hayati</b>	<p><b>EN11</b> Lokasi dan ujuan tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang di proteksi.</p> <p><b>EN12</b> Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh produk dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang di proteksi dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi.</p> <p><b>EN13</b> Perlindungan dan pemulihan habitat.</p> <p><b>EN14</b> Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.</p> <p><b>EN15</b> Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang termasuk dalam daftar merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.</p>

<p><b>Emisi, Limbah, dan Pengelolaan Limbah</b></p>	<p><b>EN16</b> jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.</p> <p><b>EN17</b> Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya dipeinci berdasarkan berat.</p> <p><b>EN18</b> Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.</p> <p><b>EN19</b> Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon diperinci berdasarkan berat.</p> <p><b>EN20</b> Nox, Sox dan emisis udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.</p> <p><b>EN21</b> Jumlah buangan air menurut kapasitas dan tujuan.</p> <p><b>EN22</b> Jumlah berat limbah menurut jenis metode pembuangan.</p> <p><b>EN23</b> Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.</p> <p><b>EN24</b> Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut</p> <p><b>EN25</b> Identitas, ukuran, status proteksi, dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan lompasan air irganisasi pelapor.</p>
<p><b>Produk dan Jasa</b></p>	<p><b>EN26</b> Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.</p> <p><b>EN27</b> Persentase produk terjual dan badan kemasannya dan regulasi lingkungan.</p>
<p><b>Pemenuhan</b></p>	<p><b>EN28</b> Nilai moneter denda yang sigifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran</p>
<p><b>Pengangkutan</b></p>	<p><b>EN29</b> Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.</p>
<p><b>Keseluruhan</b></p>	<p><b>EN30</b> Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.</p>

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guideliness

**Tabel 2.7**  
**Indikator Pelaksanaan Tenaga Kerja dan Kepatuhan Kerja**

<b>KODE</b>	<b>ITEM YANG HARUS DIUNGKAPKAN</b>
<b>Karyawan</b>	<p><b>LA1</b> Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.</p> <p><b>LA2</b> Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.</p> <p><b>LA3</b> Manfaat yang disediakan bagi karyawan (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.</p>
<b>Tenaga Kerja / Hubungan Manajemen</b>	<p><b>LA4</b> Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.</p> <p><b>LA5</b> Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.</p>
<b>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>	<p><b>LA6</b> Persentase jumlah angka kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.</p> <p><b>LA7</b> Tingkat keelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran dan jumlah keatian karena pekerjaan menurut wilayah.</p> <p><b>LA8</b> Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.</p> <p><b>LA9</b> Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.</p>
<b>Pelatihan dan Pendidikan</b>	<p><b>LA10</b> Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.</p> <p><b>LA11</b> Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.</p> <p><b>LA12</b> Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.</p>
<b>Keanekaragaman dan Persamaan Kesempatan</b>	<p><b>LA13</b> Komposisi badan pengelola/pengusaha dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia,</p>

	keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
<b>Persamaan Imbalan untuk Pria dan Wanita</b>	<b>LA14</b> Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guidelines

**Tabel 2.8**  
**Indikator Pelaksanaan Hak Asasi Manusia**

<b>KODE</b>	<b>ITEM YANG HARUS DIUNGKAPKAN</b>
<b>Investasi</b>	<b>HR1</b> Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia. <b>HR2</b> Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi atas aspek HAM. <b>HR3</b> Jumlah waktu penelitian bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
<b>Non-Diskriminasi</b>	<b>HR4</b> Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
<b>Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok</b>	<b>HR5</b> Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
<b>Tenaga Kerja Anak</b>	<b>HR6</b> Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
<b>Pegawai Tetap dan Kontrak</b>	<b>HR7</b> Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
<b>Praktik Keselamatan</b>	<b>HR8</b> Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi.
<b>Hak Masyarakat (Adat)</b>	<b>HR9</b> Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guidelines

**Tabel 2.9**  
**Indikator Pelaksanaan Pengungkapan Masyarakat**

<b>KODE</b>	<b>ITEM YANG HARUS DIUNGKAPKAN</b>
<b>Kemasyarakatan</b>	<b>SO1</b> Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
<b>Korupsi</b>	<b>SO2</b> Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. <b>SO3</b> Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi. <b>SO4</b> Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
<b>Kebijakan Publik</b>	<b>SO5</b> Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. <b>SO6</b> Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.
<b>Perilaku anti Persaingan</b>	<b>SO7</b> Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
<b>Pemenuhan</b>	<b>SO8</b> Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi non moneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guideliness

**Tabel 2.10**  
**Indikator Pelaksanaan Tanggung Jawab Produk**

<b>KODE</b>	<b>ITEM YANG HARUS DIUNGKAPKAN</b>
<b>Keselamatan dan Kesehatan Konsumen</b>	<b>PR1</b> Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting dan mengikuti prosedur tersebut. <b>PR2</b> Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama hidup, per produk.
<b>Labelling Produk dan Jasa</b>	<b>PR3</b> Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan presentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.

	<p><b>PR4</b> Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> mengenai informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.</p> <p><b>PR5</b> Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.</p>
<b>Komunikasi Pemasaran</b>	<p><b>PR6</b> Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan <i>voluntary codes</i> yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.</p> <p><b>PR7</b> Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship menurut produknya.</p>
<b>Privasi Konsumen</b>	<b>PR8</b> Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran kekeluasan pribadi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
<b>Kesesuaian</b>	<b>PR9</b> Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber: GRI (*Global Reporting Initiatives*) G3 Guidelines

### 2.2.5 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat digambarkan sebagai kondisi perusahaan yang memiliki posisi keuangan serta hasil yang telah dicapai perusahaan dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan juga merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai visi misinya. Menurut Syahnaz dan Herawati (2013) kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penting untuk menilai keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri. Laporan tahunan merupakan salah satu sumber informasi guna mendapatkangambaran kinerja perusahaan. Informasi ini diberikan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai salah satu cara untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan kepada *stakeholders* (Kartika, 2010)

(Arifani, 2013) Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.

Menurut Lukman Dendawijaya (2003:116-124), rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada bank adalah sebagai berikut:

#### 1. Analisis Rasio Likuiditas

Analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo.

- a) *Cash ratio*: rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. *Cash Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pinjaman yang Harus Segera Dibayar}} \times 100\%$$

- b) *Reserve requirement*/ likuiditas wajib minimum adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia bagi semua bank.



*Reserve requirement* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Alat Likuid}}{\text{Jumlah Dana (Simpanan) Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

- c) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank. LDR menggambarkan tingkat kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat rasio LDR maka semakin rendah tingkat kemampuan likuiditas bank tersebut. LDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

- d) *Loan to Asset Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan *total asset* yang dimiliki bank. Semakin tinggi nilai rasio ini maka tingkat kemampuan bank semakin kecil karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

- e) Rasio kewajiban bersih *call money* adalah rasio yang menunjukkan besarnya kewajiban bersih *call money* terhadap asset lancar. Semakin kecil persentase rasio ini maka semakin tinggi kemampuan bank tersebut dalam menutupi kewajiban dalam kegiatan pasar uang antar bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kewajiban Bersih Call Money}}{\text{Aset Lancar}} \times 100\%$$

- f) *Earning Assets to Total Assets Ration* (EATAR) adalah rasio aset produktif terhadap *total asset*. Aset produktif sendiri terdiri dari efek-efek, penempatan pada bank lain, pinjaman, dan penyertaan. Menurut Etty & Titik (1999) dalam penelitian Nuresya (2008) *earning assets* suatu bank akan menjadi sumber pendapatan atau laba yang akan menjadi salah satu sumber dana bagi bank tersebut. Dengan rendahnya kualitas asset suatu bank akan menimbulkan kerugian yang justru akan mengurangi volume dana yang dimilikinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EATAR = \frac{\text{Aset Produktif}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## 2. Analisis Rasio Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

- a) *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA maka menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b) *Return on Equity* (ROE) merupakan indikator bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba yang dikaitkan dengan pembayaran deviden yang membandingkan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- c) Rasio Biaya Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan melakukan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

- d) *Net Profit Margin Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

### 3. Analisis Rasio Solvabilitas

- a) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang

mengandung resiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

- b) *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan bank melaksanakan kewajibannya dengan dana yang berasal dari modal bank sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- c) *Long Term Debt to Assets Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber-sumber utang jangka panjang. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 2.2.6 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

Pengungkapan GCG mempunyai arti bahwa laporan keuangan perusahaan dibuat berdasarkan informasi dan kejelasan mengenai kegiatan perusahaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sehingga informasi tersebut dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan beserta kejadian internal dalam perusahaan.

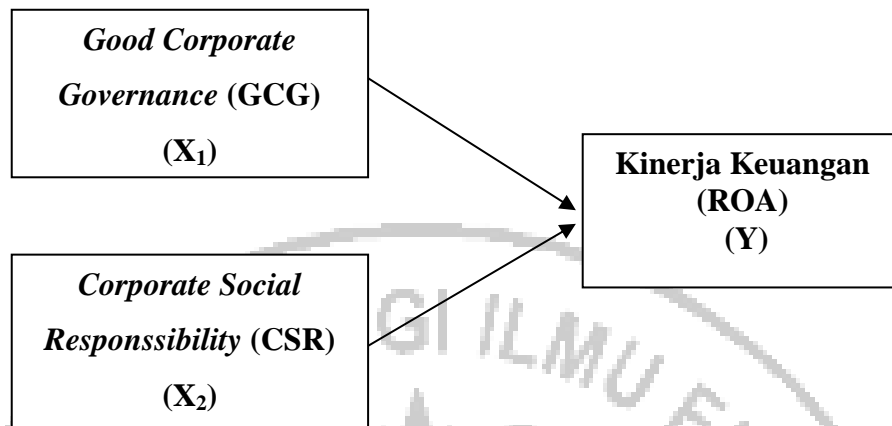
Pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin akan

dihadapi dan umumnya *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerja keuangan (Ahmar dan Salya, 2007). Semakin tinggi penerapan *Corporate Governance* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Berdasarkan penelitian Ariyani dan Gunawan (2014) menunjukkan hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Menurut Arifani (2013) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen, proporsi kepemilikan terhadap kinerja keuangan.

#### **2.2.7 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan**

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat menjadi elemen penting yang dapat menguntungkan sebagai strategi perusahaan, memberikan kontribusi pada manajemen resiko dan dapat memelihara hubungan yang jelas dapat memberikan keuntungan jangka panjang perusahaan. Dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility* dalam jangka panjang loyalitas pelanggan akan semakin tinggi. Karena meningkatkan loyalitas pelanggan, maka penjualan perusahaan akan semakin tinggi dan tingkat profitabilitas perusahaan juga akan ikut meningkat. Berdasarkan penelitian Syahnaz dan Herawati (2013) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Ariyani dan Gunawan (2014) juga menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1  
KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.4 Hipotesis Penelitian

H<sub>1</sub> : Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H<sub>2</sub> : Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.